

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi di tingkat desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab serta dapat mengembangkan desa tersebut. Dalam proses Pilkades pada Pasal 9 huruf a Panitia pemilihan Kepala Desa memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berupa Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Dalam Permendagri di atas disebutkan tugas panitia pemilih pada pasal 9 huruf a yaitu sebagai pelaksana Pilkades dan juga sebagai pengawas dalam Pilkades. Timbulnya konflik Pilkades yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon Kepala Desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan sistem pengawasan pemilihan Kepala Desa.

Kata Kunci : Pilkades, Pengawasan, Sengketa.

Abstract

The Village Head Election (Pilkades) is a democratic party at the village level, where the village community can participate by casting votes to elect a candidate for Village Head who is responsible and can develop the village. In the Pilkades process in Article 9 letter a, the Village Head election committee has the duties as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 65 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning Village Head Elections in the form of planning, coordinating, organizing, supervising and controlling all stages of the election. The Permendagri above mentions the duties of the voting committee in article 9 letter a, namely as the Pilkades organizer and also as the supervisor of the Pilkades. The emergence of a prolonged Pilkades conflict was due to fanaticism and the violent confrontation of supporters of the Village Head candidates who were fighting each other face to face for the victory of their respective candidates. The conflict started with dissatisfaction, various feelings over the victory of the elected candidates due to fraud and manipulation as a result of the very tight vote acquisition and the reactions of a number of parties with an interest in this case tended to be excessive. The purpose of this research is to determine the rules of the village head election supervision system.

Keywords: Pilkades, Supervosopn, Dispute.